

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 KABUPATEN BINTAN TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Oleh :

RASYID MAULANA

NIM. 150563201079

150563201079@student.umrah.ac.id

ABSTRAK

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus bersama-sama dan menjadi tanggungjawab bersama. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peneliti melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif dengan maksud untuk memahami permasalahan yang dialami oleh subjek penelitian yakni faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan. Fenomena ini Peneliti kaji secara mendalam dengan menggunakan teori Kebijakan George C. Edward III yang menjelaskan guna mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan, dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. George C. Edward III juga menyatakan bahwa ada empat variabel krusial dalam implementasi yakni komunikasi, sumberdaya, watak atau sikap dan struktur birokrasi keempat faktor tersebut beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sudah di implemnetasikan akan tetapi belum efektif, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi leading sektor sudah berusaha menjalankan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak namun sosialisasi tidak sering di lakukan dan penyebarluaran informasi juga hanya dengan cara disiarkan diradio RRI, sosialisasi dimasing-masing OPD dan Kecamatan serta pembagian stikersticker, pamphlet, baliho dan sebagainya juga belum di lakukan. Sosialisasi jika dilakukan tidak intens dengan jumlah perserta yang hadir hanya sedikit belum bisa sampai ke semua lapisan menyeluruh seperti masyarakat dan semua pegawai karena yang menghadiri sosialisasi hanya perwakilan saja dari masing-masing OPD saja.

Kata Kunci : Implementasi, Perda, Anak

IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 1 YEAR 2014 OF BINTAN REGENCY CONCERNING CHILD PROTECTION

By :

RASYID MAULANA

NIM. 150563201079

150563201079@student.umrah.ac.id

ABSTRAK

The problem of child protection is something that is complex and causes various problems that cannot always be solved individually, but must be jointly and become a shared responsibility. Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and protection from violence and discrimination. Researchers conducted this study using qualitative methods with the aim of understanding the problems experienced by research subjects, namely the factors that influence policy implementation. This phenomenon The researcher examines in depth using George C. Edward III's Policy theory which explains that in order to achieve policy objectives, policy formulation and implementation must be prepared and planned properly. George C. Edward III also stated that there are four crucial variables in the implementation, namely communication, resources, character or attitude and the bureaucratic structure of the four factors that operate simultaneously and interact with each other. The results of the study show that Regional Regulation Number 1 of 2014 concerning the Implementation of Child Protection has been implemented but has not been effective, in this case the Office of Women's Empowerment and Child Protection and Family Planning (DP3KB) Bintan Regency which is the leading sector has tried to carry out the socialization of Regional Regulation Number 1 of 2014 concerning the Implementation of Child Protection, but socialization is not often carried out and the dissemination of information is also only carried out by broadcasting on the RRI radio, socialization in each OPD and District and distribution of stickers, pamphlets, billboards and so on has not been carried out. If the socialization is not intense, with only a small number of participants present, it cannot reach all levels as a whole, such as the community and all employees, because only representatives from each OPD attend the socialization.

Keywords : ***Implementation, Regional Regulations, Child***